

**ASPEK HUKUM JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi kasus di BPR Bank Pasar Surakarta)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

**DHIMAS PERDHANA PUTRA
C 100 050 143**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dasar Negara Indonesia, di dalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah Negara yang mengatakan bahwa sebagai sebuah Negara, Indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, pemerintah dalam rangka melaksanakan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam suatu organisasi kenegaraan Negara Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya haruslah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan

demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus¹. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang tercapainya pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kestinambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian dan kestinambungan aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan.

Membangun pada hakekatnya berarti melakukan kegiatan saat ini untuk meraih sasaran yang baru dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai sasaran untuk masa depan yang sebelumnya disepakati bersama, secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat atau ditentukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah). Dalam sasaran ini dimasukkan hal-hal yang diinginkan dan diharapkan bersama dan bagaimana mencapainya, memperhatikan modal yang tersedia modal dalam arti fisik, sumber daya manusia dan alam serta kelembagaan yang ada, peluang yang ada maupun berbagai masalah dan kendala yang menjadi tantangan bangsa, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar.

¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: PT. Mediatama Sarana, 1991, hal 7.

Salah satu sector yang digunakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya untuk mensejahterakan warga negaranya adalah melalui dunia perbankan. Terkait dengan hal tersebut fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam undang-undang perbankan 1967 dan undang-undang perbankan yang baru, yaitu pada pasal 1 huruf a undang-undang perbankan tahun 1967 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, undang-undang perbankan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank mempunyai fungsi sebagai “*financial intermediary*”², dimana fungsinya adalah sebagai penghimpun dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran,

² Racmadi usman, *aspek-aspek hokum perbankan di Indonesia, Jakarta, P.T gramedia pustaka utama, 2001, hal 59.*

dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sementara sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Berkaitan dengan fungsinya tersebut, perbankan Indonesia mempunyai ciri tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan pada umumnya³. Fungsi perbankan bukan hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya.

Dengan adanya perubahan pada undang-undang perbankan, kembali kelembagaan bank di tata ulang ke dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu: Bank umum dan Bank perkreditan rakyat⁴. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sejalan dengan fungsi perbankan yang disebutkan pada paragraph sebelumnya, maka untuk mencapai tujuannya sebagai lembaga keuangan, Bank

³ *Ibid.*

⁴ *Pasal 5 Undang-undang No. 7 tahun 1992.*

mengeluarkan produk bank, dimana pada dasarnya produk bank yang utama adalah deposito (dalam arti simpanan-simpanan) dan kredit (dalam arti pinjaman-pinjaman)⁵. Produk yang berupa deposito bermacam-macam jenisnya seperti: Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, sertifikat bank Indonesia, deposito antar bank, dan lain-lain. Sementara produk yang berasal dari kredit antara lain: kredit jangka pendek, kredit jangka panjang, kredit konsumsi, kredit perumahan, dan lain-lain. Sementara untuk jenis usaha yang berkaitan dengan Negara lain, masih ada produk-produk bank seperti *swap* dan *futures*, *multicurrency lending*, *tax leasing*, dan lainnya.

Terkait dengan peranya sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), maka setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang meningkat, sedangkan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapainya adalah terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari baik dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, akan tetapi sampai di desa-desapun kata kredit sangat populer.

⁵ Husein Umar, *strategi management in action*, Jakarta, P.T gramedia pustaka utama, 2001, hal 136.

Istilah kredit berasal dari kata Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth tau faith*)⁶. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) di masa mendatang akan sungguh memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, dan apa yang dijanjikannya itu dapat berupa barang, uang maupun jasa. Sementara UU No. 10 tahun 1998 memberikan pengertian mengenai kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁷.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa bank sebagai lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, bank tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

⁶ Thomas suyatno, *dasar-dasar perkreditan*, Jakarta, P.T Gramedia pustaka utama, 1995, hal 12.

⁷ Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998

Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan berbagai macam kemudahan dan kemewahan dalam setiap produknya seperti misalnya Hand phone, dan televisi, sepeda motor, dll. Membawa dampak langsung pada meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat, dengan adanya budaya konsumerisme maka kebutuhan yang harus dipenuhi setiap individu pun semakin bertambah, sementara pendapatan yang diperoleh sangat terbatas. Hal ini mudah kita lihat pada kalangan Pegawai Negeri Sipil yang untuk memenuhi kebutuhannya hanya mengandalkan gaji yang diperolehnya setiap satu bulan sekali. Harapan untuk berkehidupan secara berlebih layaknya orang kaya bagi pegawai negeri adalah sangat sulit.

Dengan melihat kondisi demikian, pihak perbankan pun cepat tanggap dan berusaha menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* dimana perannya ini diwujudkan dengan mengeluarkan suatu produk yang dinamakan kredit, yang mana perjanjiannya mengacu pada perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan pengertian pasal 1754 KUH perdata

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau

bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam-meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit. Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman uang⁸.

Dalam pelaksanaanya, biasanya pihak bank melakukan *survei* terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang harus dimiliki dalam perbankan. Sejalan dengan pendapat ini Prof Dr Sri Soedewi Masichoen Sofwan mengemukakan pendapatnya :

*“Dalam rangka pembangunan ekonomi bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit ini”*⁹.

Namun tidak semua Pegawai Negeri mampu memenuhi persyaratan kredit dalam hal jaminan yang berupa benda, terutama bagi para pegawai negeri yang bergolongan rendah dan berpenghasilan pas-pasan yang terkadang mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat tersebut. Tetapi melalui BPR Bank Pasar Surakarta

⁸ Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, 2003 hal 97

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pook-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 2.

yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri yaitu dengan memberi kemudahan dalam mengajukan kredit dengan jaminan yang mudah dan pasti dimiliki, dan yang penting bagi BPR Bank Pasar Surakarta dalam memberikan pinjaman uang kepada krediturnya adalah adanya keyakinan bahwa krediturnya tersebut pasti mampu membayar pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan aspek jaminan dalam perjanjian pinjaman meminjam uang oleh para pegawai negeri sipil kota Surakarta. Maka dengan alasan tersebut maka penulis mengambil judul: ***ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi kasus di BPR Bank Pasar Surakarta).***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta?
2. Aspek hukum jaminan apakah yang diterapkan dalam perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta?
3. Permasalahan-permasalahan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta, serta bagaimana cara pemecahannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan objektif

- a. Untuk mendeskripsikan dan memahami gambaran serta penjelasan yang nyata tentang prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.
- b. Untuk mengetahui aspek hukum jaminan apa sajakah yang diterapkan pada pengajuan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang timbul pada pelaksanaan pengajuan prosedur perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.

2. Tujuan subjektif

Memahami dan mengembangkan teori yang telah diperoleh, sehingga dapat diterapkan dalam praktek lapangan dengan harapan agar dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam prosedur peminjaman di BPR Bank Pasar Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang turut memanfaatkan tulisan ini sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai hukum jaminan.
- b. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan wawasan yang nyata dan memberikan informasi kepada pihak yang memanfaatkan jasa perbankan.
- b. Memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam bidang pengajuan kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan metode ilmiah.¹⁰ Pemilihan metode penelitian sangat berpengaruh pada kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dengan metode skripsi deskriptif, adapun pengertian dari penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya maksudnya dalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat terori yang lama, atau dalam rangka menyusun teori yang baru”¹¹

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 4.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hal. 20.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, memberi data yang seteliti mungkin, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta serta aspek jaminan yang menyertainya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan suatu kajian aspek hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹² Sehingga dapat diketahui prosedur pengajuan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.

3. Data penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data yang menurut cara memperolehnya, yaitu:

a. Sumber data primer

Suatu cara untuk memperoleh data melalui proses penelitian secara langsung dilapangan yang merupakan hasil konsultasi dari pihak yang

¹² Hadi Kusuma, *Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Madju, 1995, hal. 61.

terkait terutama dari pihak yang terlibat dalam prosedur pengajuan perjanjian kredit di BPR Bank Pasar Surakarta dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini.

1) Metode wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara atau tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak dari BPR Bank Pasar Surakarta.

2) Metode observasi

Suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan melaksanakan pengamatan secara langsung objek yang diteliti dalam hal ini adalah Kantor BPR Bank Pasar Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, juga peraturan perundangan maupun pendapat para sarjana serta data-data yang diperoleh dari pihak BPR Bank Pasar Surakarta, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dan dapat dijadikan sebagai landasan teori.

4. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di BPR Bank Pasar Surakarta.

5. Metode analisis data

Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis secara kualitatif. Tujuan dari analisis data ialah memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan kembali bahan-bahan yang telah penulis peroleh dari kegiatan penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh maka rancangan kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah.
- B. Perumusan masalah.
- C. Tujuan penelitian.
- D. Manfaat penelitian.
- E. Metode penelitian.
- F. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum mengenai perbankan.
 - 1. Pengertian Bank.
 - 2. Fungsi Bank.
 - 3. Jenis Bank.

4. Bentuk Hukum Bank.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

1. Pengertian perjanjian.
2. Syarat Sahnya Perjanjian.
3. Asas-asas perjanjian.
4. Jenis-jenis perjanjian.
5. Berakhirnya perjanjian.

C. Tinjauan Umum mengenai perjanjian kredit.

1. Pengertian kredit.
2. Tujuan kredit.
3. Fungsi Kredit.
4. Jenis-jenis Kredit.

D. Tinjauan Umum Jaminan.

1. Pengertian jaminan.
2. Kegunaan dari Jaminan.
3. Syarat-syarat Benda Jaminan.
4. Manfaat Benda Jaminan Bagi Kreditur.
5. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Sifatnya.
6. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Objek/Bendanya.
7. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Terjadinya.

E. Tinjauan mengenai gadai.

1. Pengertian Gadai.

2. Sifat-sifat Umum Gadai.
3. Barang yang dapat Digadai.
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.
5. Prosedur dan Syarat Terjadinya Gadai.
6. Berakhirnya Gadai.

F. Tinjauan mengenai fidusia

1. Latar Belakang Keluarnya Undang-Undang Fidusia.
2. Dasar Hukum Penetapan Jaminan Fidusia.
3. Ruang Lingkup Objek Fidusia.
4. Akibat Hukum Dikeluarkannya UU Fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.
- B. Aspek Jaminan yang Diterapkan dalam Perjanjian Kredit di BPR Bank Pasar Surakarta.
- C. Permasalahan yang Timbul dan Cara Penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran